

Rabu, 21 Maret 2018 - Iman Dani Ramdani

Saran-saran yang disampaikan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Disdik Jawa Barat salahsatunya terkait perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Jalur *Memorandum of Understanding* (MoU). Menurut Ombudsman, jalur MoU berpotensi menimbulkan maladministrasi sehingga harus dihapuskan. Asisten Ombudsman, Noer Adhe Purnama menyampaikan bahwa penerapan MoU rawan terjadinya diskriminasi terhadap peserta didik. "Dibeberapa daerah di Jawa Barat, Jalur MoU sering disalahgunakan para pejabat daerah untuk sekadar "menitipkan anaknya". Hal ini diperparah oleh MoU yang sifatnya dadakan, bahkan surat rekomendasi yang dibuat oleh penyelenggara negara di daerah dapat dijadikan dasar untuk memasukan siswa", tegas Adhe. Adhe mengecualikan untuk MoU yang beberapa fasilitas sekolahnya menggunakan aset diluar Disdik/Kemendikbud. Menurutnya hal itu dapat dimaklumi.

Kadisdik Jabar, Ahmad Hadadi menyambut baik saran Ombudsman tersebut. Hadadi menyebut bahwa hal-hal yang disarankan oleh Ombudsman telah sejalan dengan Disdik Jabar. "Juknis sedang dalam proses penyempurnaan, adapun terkait yang dikritisi sudah sejalan dengan apa yang telah disebutkan ORI (Ombudsman Republik Indonesia)", ungkap Kadisdik. Menurut Kadisdik, pada sisi lain dilapangan penyelenggaraan PPDB ini rawan tekanan-tekanan dari pihak luar. Beberapa Kepala Sekolah bahkan tidak mengaktifkan *handpone* nya menjelang PPDB, karena kuatnya intimidasi dari pihak-pihak luar. "Tidak hanya teror sms, tetapi juga fisik, mungkin juga pada keluarga", ungkapnya. Kadisdik berharap ada semacam perlindungan dan jaminan hidup bagi pihak Sekolah dari aparat keamanan menjelang PPDB berlangsung nantinya. Â Â Â

$$\hat{A} \hat{A} \hat{A} \hat{\epsilon}^{1/2} \hat{\epsilon}^{1/2} \{ \hat{\epsilon}^{1/2} \}$$